

**PERAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PILKADA 2024
DIWILAYAH KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN PROVINSI LAMPUNG**

Muhammad Pakal Pirmananda

NPP. 32.0286

Asdaf Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: nandapirmananda@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Sarwani, M.Ag.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (Gap): This study was conducted based on the political non-participation of the Community related to the Regional Head Election in Natar District. Political participation is an important indicator in the success of the implementation of democracy. However, the level of community participation in this area has not yet reached the national target. **Purpose:** This study aims to determine the role of the District Election Committee (PPK) in increasing political participation and the community causing obstacles in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Natar District, South Lampung Regency. **Method:** This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation. Informants consist of the Chairperson of the KPU, PPK members, the Natar Sub-district Head, and the local community. **Results/Findings:** The results of the study show that the PPK has a strategic role in conducting socialization, political education, and monitoring and maintaining voter data. However, there are several obstacles facing the PPK, including budget constraints, low political literacy, community and geographical and infrastructure constraints. **Conclusion:** The role of PPK is very vital in encouraging political participation, but full support from all stakeholders is needed so that the target of participation in the 2024 Pilkada can be achieved. **Keywords:** Sub-district Election Committee (PPK), political participation, 2024 Pilkada

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini dilakukan berdasarkan kurangnya partisipasi politik dari Masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah pada kecamatan Natar. Partisipasi politik merupakan indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Namun, tingkat partisipasi masyarakat di wilayah ini masih belum mencapai target nasional. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan mengevaluasi kendala pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Ketua KPU, anggota PPK, Camat Natar, dan masyarakat setempat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi, pendidikan politik, serta pengawasan dan pengelolaan data pemilih. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi PPK, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya literasi politik masyarakat, serta tantangan geografis dan infrastruktur. **Kesimpulan:** peran PPK sangat vital dalam mendorong partisipasi politik, namun dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar target partisipasi pada Pilkada 2024 dapat tercapai. **Kata Kunci:** Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), partisipasi politik, Pilkada 2024

I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat di negara demokratis seperti Indonesia. Pemilu menjadi bagian dari pelaksanaan sistem demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Melalui pemilu, rakyat dapat memilih pemimpin dan wakil mereka yang dianggap dapat memperjuangkan aspirasi serta kepentingan bersama. Pemilihan umum dilakukan setiap satu periode atau 5 (lima) tahun sekali guna memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden (Labolo & Ilham, 2015). Salah satu bentuk nyata pemilu di Indonesia adalah pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pilkada menjadi momentum penting dalam demokrasi lokal, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap mampu membangun wilayahnya. Selain itu, pilkada juga menjadi ajang bagi elite politik untuk menunjukkan kapasitas dan kapabilitas mereka.

Pelaksanaan Pilkada harus memenuhi prinsip-prinsip demokratis serta menjadi sarana integrasi bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan Pilkada bergantung pada peran berbagai lembaga penyelenggara pemilu, salah satunya adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bertugas di

tingkat kecamatan. PPK memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan pelaksanaan tahapan pemilu dan menjadi ujung tombak keberhasilan Pilkada.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 4 Tahun 2023, PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. PPK juga diwajibkan untuk menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti PPS, Panwaslu, pemerintah daerah, dan KPU kabupaten. PPK bertugas sejak beberapa bulan sebelum hingga beberapa bulan setelah hari pemungutan suara.

Tugas PPK mencakup pelaksanaan seluruh tahapan pemilu di tingkat kecamatan, mulai dari pendataan pemilih, rekapitulasi suara, hingga edukasi politik kepada masyarakat, termasuk pemilih pemula dan perempuan. Edukasi ini penting untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekan angka golput, terutama di daerah-daerah dengan tingkat partisipasi rendah.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, tingkat partisipasi politik di Kabupaten Lampung Selatan hanya mencapai 64,77%, lebih rendah dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Provinsi Lampung, serta di bawah target nasional sebesar 77,5%. Penurunan ini menunjukkan perlunya strategi khusus untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Pilkada mendatang.

Berdasarkan data dari KPU, Pilkada serentak berikutnya akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pasangan calon telah ditetapkan, dan DPT Kabupaten Lampung Selatan mencapai 790.716 pemilih. Dengan kondisi ini, peran PPK menjadi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Natar yang sebelumnya mengalami penurunan partisipasi.

Melihat realita tersebut, peneliti merasa perlu untuk meneliti peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024, khususnya di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

I.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang partisipasi politik dan peran penyelenggara pemilu, terdapat sejumlah celah penting yang belum sepenuhnya diangkat oleh penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada strategi kampanye pasangan calon (misalnya pasangan Nanang-Pandu), partisipasi politik penyandang disabilitas, peran perempuan, atau pelaksanaan pemilu di wilayah atau masa tertentu, seperti pada masa pandemi.

Namun, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai lembaga adhoc KPU dalam meningkatkan partisipasi politik di Kecamatan Natar, khususnya dalam konteks Pilkada serentak tahun 2024. Padahal, berdasarkan data Pilkada 2020, Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan angka partisipasi

yang masih di bawah target nasional (64,77% dari target 77,5%), bahkan mengalami penurunan dari pilkada sebelumnya.

Kecamatan Natar sebagai salah satu wilayah dengan tingkat partisipasi rendah membutuhkan perhatian khusus. Penelitian yang berfokus pada peran PPK sebagai aktor strategis dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan pendidikan politik di masyarakat menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur yang ada. Terlebih lagi, dalam penelitian ini digunakan teori peran dari Biddle dan Thomas, yang belum banyak diaplikasikan dalam studi sejenis. Komunikasi yang terjalin melalui media sosial memungkinkan aktor politik untuk secara terus-menerus membangun engagement, sehingga menumbuhkan rasa kedekatan dan kepercayaan antara pemilih dengan kandidat (Dimitrova & Matthes, 2018)

Dengan demikian, gap penelitian terletak pada belum adanya studi yang mengupas secara mendalam peran PPK Kecamatan Natar dalam konteks peningkatan partisipasi politik pasca penurunan partisipasi pada Pilkada 2020, serta tantangan yang dihadapi PPK di wilayah tersebut secara empirik menjelang Pilkada 2024. Penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan itu sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi penguatan peran kelembagaan PPK ke depan.

I.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan dan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai dasar pembentukan teoritik dan identifikasi celah penelitian. Kajian dilakukan terhadap 5 (lima) penelitian terdahulu yang mengangkat tema Partisipasi Politik di berbagai wilayah. Penelitian oleh *Goestyari Kurnia Amantha, Komang Jaka Ferdian (2020)* yang berjudul *Strategi Politik Pasangan Nanang-Pandu Dalam Kontestasi Pemilikada Lampung Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan (strengths) yang dimiliki pasangan Nanang-Pandu berasal dari faktor internal dan eksternal dimana secara figure Nanang dan Pandu merupakan sosok yang memiliki daya tarik tersendiri, ditambah kerja tim yang sangat masif dan loyal dilapangan. Penelitian oleh *Wahyudi Syahputra, Uqbatul Khoir Rambe, Agusman Damanik (2024)* yang berjudul *Peran Sosialisasi PPK Dalam Mengoptimalkan Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus PPK Kecamatan Nibung Hangus)*, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nibung Hangus Menyampaikan informasi kepada ketua Panitia Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, Panitia Pemungutan Suara Desa (PPS), dan masyarakat di wilayah Kecamatan Nibung Hangus yang ingin mendapat informasi terkait pemilu. Berikut faktor penghambat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nibung Hangus dalam melaksanakan program komunitas di Kecamatan Nibung Hangus. Penelitian oleh *Givan, Rizki (2020)* yang berjudul *Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kecamatan Kuranji Kota Padang*, Berdasarkan elemen pendukung tersebut menghasilkan angka partisipasi yang meningkat di Kecamatan Kuranji dan Panitia Pemilihan Kecamatan Kuranji juga

mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang sebagai Kecamatan dengan angka partisipasi tertinggi di Kota Padang. Penelitian oleh *Madhat (2019)* yang berjudul *Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kecamatan Sajad* hasil penelitian, Setelah dilakukan pemaparan secara mendalam terkait penelitian yang tentang “Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Sajad” maka dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Penelitian oleh *Garis, R. R., & Trisnia, T. (2020)*. yang berjudul *Partispasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020* temuan penelitian, Keterwakilan politik perempuan dapat memberikan pengaruh terhadap fasilitasi berbagai kepentingan dan kebutuhan kaum perempuan secara efektif sehingga terakomodasi dalam berbagai output kebijakan. Kedudukan dan peran politik perempuan dalam struktur politik masih sangat kurang, karena adanya dominasi laki-laki dalam partai politik termasuk struktur politik yang menempatkan aktivitas politik pada tingkatan paling rendah.

I.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dalam kajian mengenai peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam konteks peningkatan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024 di wilayah Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada strategi pasangan calon, partisipasi kelompok tertentu (seperti perempuan dan disabilitas), atau kondisi umum penyelenggaraan pemilu, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi **peran kelembagaan PPK sebagai aktor pelaksana teknis pemilu tingkat kecamatan** dalam mendorong angka partisipasi politik di daerah dengan tingkat partisipasi di bawah target nasional. Kebaruan lain dari penelitian ini adalah pada **penggunaan teori peran Biddle dan Thomas dalam Hidayat & Saputra (2024)** untuk menganalisis kinerja PPK melalui indikator harapan, norma, wujud perilaku, serta evaluasi dan sanksi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini memberikan pemetaan yang lebih mendalam dan sistematis terhadap bagaimana tindakan nyata PPK diterjemahkan dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, serta pendataan pemilih, dan bagaimana peran ini dinilai oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi studi pertama yang menyoroti **PPK Kecamatan Natar secara spesifik** pasca penetapan pasangan calon dan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024, menjadikannya dokumen empiris yang kontekstual dan relevan bagi pemangku kepentingan lokal dalam evaluasi kebijakan peningkatan partisipasi pemilih.

I.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam meningkatkan peran partisipasi dari Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah serta mengetahui dan menindaklanjuti apa saja yang menjadi kendala Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam prosesnya bersosialisasi guna meningkatkan partisipasi politik pada Masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Penelitian kualitatif memfokuskan dirinya pada makna subjektif, pendefinisian, metafora, dan deskripsi pada kasus-kasus yang spesifik (Neuman & W. L., 2014). Metode kualitatif memberikan peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi dinamika interaksi sosial secara mendalam, karena peneliti tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada narasi, interpretasi, dan sudut pandang subjek penelitian (Fröhlich et al., 2019). strategi kampanye politik penyampaian pesan, serta frekuensi dan kualitas interaksi. dari (Holbert dan Benoit 2009) dengan Teknik Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai cara yang dilakukan oleh peneliti dalam mendapatkan, mengungkap, serta menjangkau informasi dari responden menurut ruang lingkup penelitian (Sujarweni, 2014). Penelitian ini menerapkan beberapa cara dalam mendapatkan data yakni dengan wawancara, observasi atau pengamatan, serta menggunakan dokumentasi sebagai teknik dalam mempermudah mengumpulkan data. Data Primer, merupakan data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti seperti data dari informan melalui kuesioner data ataupun wawancara antara peneliti dan narasumber serta melalui observasi atau pengamatan langsung di lapangan (Sugiyono, 2021). Penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel atau dapat dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2016). Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data adalah, tempat didatarkannya data yang diinginkan. Dalam penelitian pengetahuan terkait dengan sumber data sangat diperlukan agar tidak terjadinya kesalahan dalam pemilihan sumber data yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan dari penelitian. Data dalam arti sempit ialah data penelitian (Nurdin & Sri Hartati, 2018). Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder berfungsi melengkapi data yang diperlukan dari data primer (Hansen, 2020). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara kepada 14 informan yang ditentukan melalui purposive sampling yaitu penentuan informan dengan kriteria tertentu dan snowball sampling yaitu penentuan informan karena keterbatasan akses kepada informan. Informan yang ditentukan melalui purposive sampling terdiri dari Ketua KPU; Ketua PPK; Camat; dan

Masyarakat yang ada pada Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung. Teknik analisis data yang peneliti lakukan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersumber dari (Saleh, Sirajuddin 2017) Terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan/Verifikasi Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Partisipasi Politik di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung berfokus kepada peran dan kendala yang menjadi faktor penghambat serta evaluasi optimalisasi pelaksanaannya, dan terdapat pembahasan bisa dilihat pada subbab berikut.

a. **Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung**

Penulis menganalisis bagaimana Peran PPK pada Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung menggunakan teori Peran Biddle dan Thomas (1999) dalam Hidayat & Saputra (2024). Berdasarkan teori peran tersebut terdapat 4 (empat) dimensi yakni *Expectattion* (Harapan), *Norm* (Norma), *Performance* (Wujud Perilaku), dan *Evaluation* (Penilaian) – *Sanction* (Sanksi).

A. ***Expectattion* (Harapan)**

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas (1999) dalam Hidayat & Saputra (2024), *Expectattion* (Harapan), harapan tentang peran adalah harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh, harapan dari seluruh masyarakat umum terhadap *public servant* yang bebas dan bersih dari KKN. Berdasarkan hasil wawancara dan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, peneliti dapat menyimpulkan bahwa harapan dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang mengikuti pesta demokrasi berharap untuk seluruh pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan berjalan sesuai dengan asas LUBER-JURDIL.

B. ***Norm* (norma)**

norma merupakan salah satu bentuk harapan. Jenis harapan menurut Secord dan Backman: (a) harapan bersifat meramalkan (*anticipatory*), (b) harapan normatif (*prescribed role expectation*)

- a. **harapan bersifat meramalkan**, Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kita harus dapat meramalkan atau merealisasikan harapan-harapan dari masyarakat, tentunya kita juga harus memperhatikan norma-norma yang berlaku pada kehidupan sehari-hari. bahwa, menggambarkan adanya harapan yang harus diramalkan baik itu dari tim penyelenggara ataupun masyarakat itu sendiri, dan itu menjadi harapan bersama agar semua dapat meramalkan dan berkontribusi dengan baik pada jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

b. harapan normatif, Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu kita harus dapat memperhatikan norma-norma yang berlaku pada kehidupan sehari-hari, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menjadi larangan pada setiap aturan yang ada pada setiap proses pemilihan. Berdasarkan hasil wawancara dan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa, pernyataan di atas menegaskan bahwa pentingnya menjunjung tinggi norma dan kode etik dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilukada, pelaksanaan pemilukada tidak hanya menjadi pesta demokrasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi refleksi dari nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Maka dari itu peraturan yang sudah ada dan dibuat agar untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, supaya tidak terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan norma/kode etik yang dapat menimbulkan kerugian satu sama lain.

C. *Performance* (Wujud Perilaku)

peran diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar harapan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan pada Pemilukada peran dari pihak-pihak terkait dan masyarakat dapat diwujudkan dalam perilaku yang nyata, agar proses dari jalannya Pemilukada bisa terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan. Berdasarkan hasil wawancara dan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam setiap tahapan pada kegiatan pemilu, pentingnya berlaku transparansi, akuntabilitas serta berkontribusi secara nyata dan berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan pemilu secara damai dan berjalan sesuai aturan, dengan peraturan yang ada, badan penyelenggara pemilukada bisa lebih memperhatikan dan menjaga integritas dan menjadi pedoman setiap orang untuk memperhatikan wujud perilaku dalam bekerja.

D. *Evaluation* (Penilaian)/*Sanction* (Sanksi).

penilaian peran adalah pemberian kesan positif atau negatif yang didasarkan pada harapan manusia terhadap peran yang dimaksud. Dalam peningkatan partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan Pemilukada, tentunya pihak-pihak terkait dapat memberikan kesan positif dan memberikan kesan negatif kepada pelaku penyelenggara Pemilukada dalam setiap proses berjalannya Pemilukada, supaya dalam mencapai tujuan mewujudkan pemilu yang berkualitas. Berdasarkan hasil wawancara dan PKPU Nomor 8 Tahun 2022, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dari pernyataan di atas menekankan pentingnya pelayanan yang optimal dari KPU, PPK, dan Kecamatan Natar agar selalu menimbulkan kesan yang positif, disisi lain juga masyarakat diharapkan mampu menjaga peran pentingnya dalam menciptakan Pemilukada yang positif, dengan berlandaskan peraturan yang ada, badan penyelenggara dapat lebih memperhatikan kinerjanya dalam bekerja.

b. Kendala dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung

Kendala yang cukup signifikan baik dari penyelenggara pemilu ataupun dari masyarakat itu sendiri, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya literasi politik dan minimnya pengetahuan dari masyarakat yang menjadikan hal tersebut membuat mereka enggan dalam mengikuti pelaksanaan pemilu yang menjadi bagian penting dari demokrasi. Selain itu terdapat beberapa kendala lain yang menjadi faktor penghambat pada pelaksanaannya, seperti dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti seperti keterbatasan anggaran serta minimnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya telah seluruhnya dikerahkan, namun terhalang dari beberapa kendala yang menjadi penghambat tim penyelenggara untuk melakukan beberapa kegiatan kepada masyarakat yang berkaitan dengan sosialisasi masyarakat.

c. Evaluasi yang Harus Dilakukan Guna Mengoptimalkan Peran PPK Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat

Panitia Pemilihan Kecamatan harus lebih aktif dalam melaksanakan hal yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu, selain melaksanakan semua tahapan pemilu, PPK juga dapat melakukan pemberdayaan Edukasi Politik tentang peningkatan kesadaran pentingnya berpartisipasi dalam pemilu.

Selain itu, untuk penyelenggaraan pilkada bukan hanya peran PPK saja yang ditingkatkan/dioptimalkan, namun kita juga harus sadar akan pentingnya peran aktif dari masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman penyelenggaraan sosialisasi sebelumnya, dimana respon atau timbal balik dari masyarakat itu sendiri masih kurang. Maka dari itu perlu juga dilakukannya komunikasi dari dua arah, antara penyelenggara pilkada dan masyarakat, dapat kita ambil contoh dari evaluasi yang diberikan oleh KPU terhadap jalannya pelaksanaan pemilu. Dengan adanya evaluasi ini, bisa ditingkatkan kembali dan disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta mekanisme yang dipakai untuk pendekatan kepada masyarakat termasuk pendekatan yang lebih mendalam melalui budaya-budaya yang ada pada masyarakat setempat.

Dari beberapa lembaga yang terkait dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, PPK harus dapat bekerja sama dengan erat baik dari lembaga yang ada di atas ataupun di bawah PPK untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, mengapa demikian, Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan Pilkada, khususnya pada sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait, demi melancarkan proses sosialisasi yang akurat, harus mendapatkan anggaran yang sesuai dan fasilitas yang memadai.

d. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2024 di Kecamatan Natar. Berdasarkan teori peran oleh Biddle dan Thomas, ditemukan bahwa PPK mewujudkan perannya dalam empat aspek penting: harapan masyarakat (expectation), pelaksanaan norma (norm), perilaku nyata (performance), serta evaluasi dan sanksi sosial (evaluation and sanction).

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa **kendala utama** yang menghambat kinerja PPK, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya literasi politik masyarakat, serta hambatan geografis yang menyebabkan kesulitan akses informasi. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas program sosialisasi dan distribusi informasi pemilu.

Secara umum, temuan menunjukkan bahwa peran PPK sangat signifikan dalam membentuk kualitas partisipasi politik masyarakat. Dengan dukungan dari KPU, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat, PPK dapat menjadi garda depan dalam mengedukasi dan memobilisasi pemilih, khususnya di Kecamatan Natar.

Oleh karena itu, PPK diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan inovatif dalam menyampaikan informasi dan meningkatkan partisipasi politik. Dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci agar target partisipasi nasional sebesar 77,5% dapat tercapai pada Pilkada 2024.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Pilkada 2024.

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, PPK menghadapi berbagai kendala, antara lain **minimnya literasi politik masyarakat, keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta tantangan geografis dan aksesibilitas informasi**. Kendala-kendala ini berdampak pada efektivitas kegiatan sosialisasi dan penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Terlepas dari tantangan tersebut, PPK telah menunjukkan upaya aktif melalui berbagai kegiatan sosialisasi, koordinasi lintas lembaga, dan pelaksanaan pendidikan politik. Upaya ini harus terus diperkuat melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan KPU, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat untuk memastikan peningkatan partisipasi politik secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran PPK sebagai lembaga adhoc di Tingkat kecamatan bukan hanya sebatas penyelenggara teknis, tetapi juga sebagai **penggerak demokrasi lokal**. Optimalisasi peran ini sangat penting untuk mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan mencapai target partisipasi

nasional sebesar 77,5% pada Pilkada 2024, khususnya di wilayah yang sebelumnya memiliki tingkat partisipasi rendah seperti Kecamatan Natar.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama terkait dengan terbatasnya waktu dan kurangnya referensi yang dapat mendukung penelitian tentang Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di wilayah Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian ini masih bersifat awal, oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait Peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Ketua KPU, Ketua PPK, Camat Natar, dan Masyarakat yang ada pada Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Nurdin, I., & Sri Hartati. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Simangunsong, F. (2016). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Innonesia*. *Occupational Health*, 51(5), 23–25. <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>
- Dimitrova, D. V., & Matthes, J. (2018). *Social media in political campaigning around the world: Theoretical and methodological challenges*. In *Journalism & mass communication quarterly* (Vol. 95, Issue 2, pp. 333–342). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/1077699018770437>
- Fröhlich, D., Waes, S., Schoonenboom, J., & Schäfer, H. (2019). *Linking Quantitative and Qualitative Network Approaches: A Review of Mixed Methods Social Network Analysis in Education Research*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/5ckyt>
- Holbert, R. L., & Benoit, W. L. (2009). *A Theory of Political Campaign Media Connectedness*. *Communication Monographs*, 76(3), 303–332. <https://doi.org/10.1080/03637750903074693>

- Amantha, G. K., & Ferdian, K. J. (2020). *Strategi Politik Pasangan Nanang-Pandu Dalam Kontestasi Pemilikada Lampung Selatan Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Selatan*. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta *Vol 7, No 1 (2021)*
<https://doi.org/10.52447/polinter.v7i1.4578>
- Syahputra, W., & Rambe, uqbatul khoir Damanik, A. (2024). *Peran Sosialisasi PPK Dalam Mengoptimalkan Pemilu Tahun 2024 (Studi Kasus PPK Kecamatan Nibung Hangus)*. Al-Harakah Jurnal Studi Islam Volume 6 Number 1 (2024)
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alharakah/article/download/20502/8289>
- Givan, R. (2020). *Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Sosialisasi Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kecamatan Kuranji Kota Padang*. Universitas Andalas.
<http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/475743>
- Garis, R. R., & Trisnia, T. (2020). *Partispasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Kepala Desa Muktisari Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara *Vol 8, No 1 (2021)* <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.5123>
- Hansen, S. (2020). Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi. Jurnal Teknik Sipil, 27(3), 283. doi: 10.5614/jts.2020.27.3.10
- Hidayat, M. R., & Saputra, R. (2024). *PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH PEMULA MELALUI PROGRAM PEMILOS SERENTAK BAGI SISWA SMA/SEDERAJAT DI KABUPATEN KULON PROGO* (Doctoral dissertation, IPDN).
<http://eprints.ipdn.ac.id/18887/>
- Madhat. (2019). *Peran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Menghadirkan Penyandang Disabilitas Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kecamatan Sajad*. *Vol. 11 No. 1 (2022): AL-SULTHANIYAH*
<https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v11i1.2350>
- Neuman, & W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, In Pearson Education limires. Pearson Education Limited.
- Sujarweni, & V. W. (2014). *metode penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. (2013). *metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.
- Saleh, Sirajuddin. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. In P. P. Ramadhan (Ed.) (PenerbitP).